

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Kesejahteraan sosial adalah sistem lembaga dan layanan sosial yang terorganisir serta dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Social welfare is the organized system of social service and institution, designed to aid individual and groups to attain satisfying standards of life and health, and health, and proposal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Definisi di atas menunjukkan kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam lembaga-lembaga yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi berbagai masalah sosial yang ada pada individu, kelompok serta masyarakat melalui perbaikan taraf kesejahteraan hidup yang lebih baik, meningkatkan kemampuan, dan memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurut Midgley (1997:5) dalam Isbandi (2015:23) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai:

“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.”.

Berdasarkan definisi menurut Midgley kesejahteraan sosial tidak menempatkan hanya pada satu aspek saja yang lebih penting melainkan harus membutuhkan aspek-aspek lainnya untuk memberikan aspek keseimbangan dalam memenuhi aspek sosial, material dan juga spiritual bagi individu, kelompok maupun masyarakat sehingga dapat terbentuk tatanan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma kelayakan dalam menalani kehidupan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu disiplin ilmu akademik berkaitan erat hubungannya dengan ilmu kesejahteraan sosial yang mengembangkan ide, strategi dan juga teknik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Menurut Adi Fahrudin (2015:23) ilmu kesejahteraan sosial yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sebuah aplikasi yang mempelajari dan mengembangkan kerangka ideologis dan metodologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti mengatasi masalah sosial, menanggapi kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan peluang bagi anggota masyarakat berkembang melalui pengelolaan masalah sosial: pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan definisi di atas menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang mengalami masalah-masalah sosial. Melalui kerangka pikiran yang ideologis dan metodologis kesejahteraan sosial diharapkan dapat mencegah, mengatasi serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu, kelompok, maupun masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah “Kondisi terpenuhnya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Jika melihat dari definisi di atas kesejahteraan sosial merupakan tata serangkaian pelayanan sosial bagi individu, kelompok serta masyarakat yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baik itu sandang, papan, dan pangan yang harus mereka dapatkan. Kesejahteraan sosial apa bila setiap individu, kelompok, dan masyarakat mampu mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan seperti spiritual, sosial serta memiliki kehidupan yang layak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial bahwa:

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, mental maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas kesejahteraan sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, melalui pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual guna melahirkan keselamatan dan ketentraman lahir dan batin bagi setiap individu, kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan mengambil peran penting dalam memberikan layanan-layanan kesejahteraan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah upaya mengembalikan segala bentuk aspek sosial yang ada di dalam diri seseorang maupun kelompok dalam membantu memulihkan keadaan sosial mereka. Menurut Adi Fahrudin (2014:10) kesejahteraan sosial memiliki tujuan:

1. Untuk membantu menjadikan kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya kualitas pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkat, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2018:10-12) mengemukakan tiga tujuan utama dari kesejahteraan sosial sebagai sistem yaitu:

1. **Pemeliharaan Sistem**

Memelihara keseimbangan nilai dan norma sosial serta aturan-taturan sosial yang terdapat pada masyarakat, termasuk masalah-masalah berkaitan dengan tujuan hidup seperti: kelangsungan hidup individu, kolektif norma-norma dalam menjalankan peran laki-laki dan perempuan, serta anak-anak, remaja, dewasa dan golongan orang lanjut usia.

2. **Pengawasan Sistem**

Secara efektif memantau perilaku tidak sesuai dengan norma sosial atau standar etika. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan meliputi: pemberian kompensasi, penguatan fungsi konservasi dalam bentuk

sosialisasi, dan perluasan fasilitas yang ada kepada kelompok sosial yang menunjukkan penyimpangan perilaku (misalnya pemuda dan kelompok sosial lainnya).

3. Perubahan Sistem

Menerapkan perubahan untuk mengembangkan sistem lebih optimal bagi masyarakat. Dalam mewujudkan perubahan ini, sistem sosial berfungsi sebagai alat menghilangkan tantangan dan hambatan penuh sehingga dapat membantu distribusi sumber daya yang lebih besar dan adil. Hal ini juga bertujuan untuk memanfaatkan secara adil struktur peluang yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf, mutu hidup, dan kelangsungan kesejahteraan.
2. Memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan kapasitas, kesadaran dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara institusional.
5. Meningkatkan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi untuk mengembalikan fungsional peranan-peranan sosial dari suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau kerusakan akibat adanya perubahan. Fungsi kesejahteraan sosial secara umum

adalah sebagai penunjang pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti Pembangunan sektor ekonomi. Tiap daerah mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda, maka terdapat perbedaan pula pada penekanan fungsi kesejahteraan sosial. Menurut Friedlander & Apte, dalam Fahrudin (2014:12) fungsi-fungsi kesejahteraan sebagai berikut:

a. Fungsi pencegahan (Preventif)

Kesejahteraan sosial ditunjuk untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditunjuk untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung dalam proses Pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. Fungsi penunjang merupakan bantuan layanan-layan dalam sistem kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, fungsi kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan dalam mengembangkan pembangunan baik dari aspek pelayanan sosial, sumber daya sosial dalam membantu mengemablikan orang-orang yang mengalami kecacatan baik segi manusia atau dari sumber daya yang belum memadai untuk nanti ditingkatkan.

2.1.4 Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Kesejahteraan sosial sebagai usaha merupakan tindakan melalui program yang di tunjukkan untuk mewujudkan, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial yang menjelaskan bahwa:

Usaha kesejahteraan sosial merupakan tindakan atau upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam suatu pelayanan sosial. Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012:15) kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Terutama sebagai kegiatan organisasi yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan, perlindungan dan peningkatan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut meliputi bantuan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan anak, kejahatan, kesehatan jiwa dan masyarakat, tenaga kerja, dan lain-lain

Berkaca dari pengertian-pengertian di atas, bahwa usaha kesejahteraan sosial dipandang sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan sosial untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar setiap warga negara. Usaha Kesejahteraan sosial diartikan juga sebagai suatu sistem terorganisir melalui program-program dan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial yang ada di pada individu, kelompok dan masyarakat. Menurut Edi Suharto (2010:4)

Insentif kesejahteraan sosial diterjemahkan sebagai upaya terencana dan terlembaga yang melibatkan intervensi sosial dalam pelayanan sosial dengan tujuan mengembalikan kebutuhan orang, mencegah serta membantu menyelesaikan permasalahan dan memperkuat institusi sosial.

Pengertian di atas menjelaskan usaha kesejahteraan sosial sebagai bentuk dari pelayanan sosial berbasis intervensi pertolongan kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dalam bentuk program dan kebijakan dengan maksud membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat agar dapat mengembalikan peranan mereka didalam tatanan kehidupan.

2.1.5 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisir memiliki tujuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas individu, kelompok dan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dalam melaksanakan pelayanan dan kegiatan tersebut, tentunya membutuhkan komponen-komponen yang menunjang dalam keberlangsungan dalam kegiatan tersebut. Menurut Fahrudin (2012:16-17) komponen-komponen kesejahteraan sosial meliputi:

1. Organisasi Formal

Usaha terorganisasi dilakukan secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2. Pendanaan

Memiliki tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. *Profesionalisme*

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundangan-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan, pengakhiran layanan.

6. Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu peranserta masyarakat menjadi komponen yang harus diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran

Komponen-komponen di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial sistematis yang bertujuan untuk

memberikan kehidupan sejahtera kepada individu, kelompok dan masyarakat yang sedang mengalami permasalahan didalam kehidupannya. Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera perlu keterlibat pihak-pihak yang memiliki tanggungjawan dalam dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah suatu susunan sistem yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi individu, kelompok dan masyarakat. Bidang kesejahteraan sosial sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Menurut Fink Friedlander, Mendoza, Zastrow, dan Kirst-Asman dalam Isbandi (2015:91-100) bidang kesejahteraan dalam arti sempit yaitu:

1. Bidang Sistem Penyampain Layanan (*Service Delivery System*)

Sistem penyampaian layanan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan sistem penyampaian layanan yang baik maka salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan terhadap individu, kelmok, maupun masyarakat dapat terpenuhi.

2. Bidang Layanan Sosial terhadap Keluarga

Layanan terhadap keluarga merupakan salah satu unit dasar terkecil dari suatu masyarakat, karena keluargalah yang pada awalnya membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang.

3. Bidang Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda

Fink dalam Isbandi (2015:92) melihat layanan terhadap anak mempunyai tanggung jawab, antara lain untuk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak diterlantarkan ataupun dianiaya.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia

Sejalan dengan semakin berkembangnya layanan kesehatan, maka angka harapan hidup dalam suatu masyarakat juga ikut meningkat. Karena itu jumlah lansia juga meningkat. Bentuk pelayanan yang diberikan bagi lansia dapat berbentuk layanan guna memenuhi kehidupan fisik ataupun kebutuhan psikis mereka.

5. Bidang Kelompok Khusus

Mendoza dalam Isbandi (2015:94) menjelaskan bidang yang terkait dengan kelompok khusus.

6. Bidang Jaminan Sosial

Pada masyarakat industri, bidang jaminan sosial menjadi salah satu yang diharapkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Bagi orang-orang yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), menderita cacat. Atau mengalami gangguan lainnya yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka mereka sering sekali memerlukan bantuan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan mereka.

7. Bidang Pengentasan Kemiskinan

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, Friedlander dalam Isbandi (2015:95) lebih menekankan pada peran praktis dalam mengembangkan kebijakan, program aksi komunitas di masyarakat dan pengembangan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan.

8. Bidang Layanan Kesehatan Masyarakat

Pengertian mengenai kesejahteraan masyarakat di dalamnya terkait dengan mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka bebas dari suatu penyakit menjadi salah satu indikator tersendiri dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

9. Bidang Perawatan Medik

Bidang perawatan medik pekerja sosial beserta praktisi bergerak pada bidang kedokteran (seperti dokter, perawat, dan fisioterapis) berupaya untuk merawat dan menyembuhkan klien yang mengalami gangguan fisik dan emosional.

10. Bidang Layanan Kesehatan Jiwa

Pada bidang kesehatan jiwa, sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial bekerja sama dengan psikiater, perawat dan psikolog serta beberapa profesi yang terkait mencoba merawat dan mengembangkan program terapi bagi klien yang menderita gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan maupun berat.

11. Bidang Lembaga Koreksional

Bidang lembaga koreksional praktis kesejahteraan sosial di beberapa negara dapat bertugas di lembaga pemasyarakatan anak, praktis kesejahteraan sosial dapat pula bergerak.

2.2 Tinjauan Pelayanan Sosial

2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tujuan untuk mengembalikan dan memenuhi hak dan kewajiban manusia. Pelayanan sosial sebagai tempat pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial, mengambil peran penting dalam mengembalikan kehidupan, kehidupan, mental maupun spiritual masyarakat agar fungsi sosialnya dapat kembali seperti masyarakat pada umumnya.

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Muhidin (1992:41) pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan yang mencakup fungsi pembangunan, pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Pelayanan sosial dalam arti sempit kegiatan dalam suatu program bantuan dan perlindungan bagi sekelompok kurang mampu, seperti anak terlanar, tunawisma, pengemis, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pelayanan sosial merupakan pelayanan yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat melalui beberapa bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, dan yang lainnya. Pelayanan sosial sebagai pelayanan yang bermaksud mengembangkan masyarakat

melalu beberapa program yang telah ada tentunya dapat membantu gelandangan, pengemis, anak telantar dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan terukur. Pada dasarnya, pelayanan sosial adalah pelayanan yang dibutuhkan oleh orang-orang penyandang masalah kesejahteraan sosial di belahan dunia maupun, termasuk Indonesia. Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemangku kebijakan dan program diharapkan dapat membantu meringankan masalah-nasalah penyandang kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil definisi sebelumnya, pemenuhan pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal menjadi tempat perlindungan serta bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk mengembalikan keberfungsian, setiap individu, kelompok maupun masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial pada hakikatnya memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengembalikan pengambilan peranan mereka dalam masyarakat. Menurut Richard M, Titimuus dalam Muhidin (1992:43) fungsi pelayanan sosial menurut perspektif masyarakat sebagai berikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayana atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.

3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial misalnya, kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya.
4. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

2.2.3 Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagai pelayanan kemanusiaan berfokus pada proses pemberdayaan individu, kelompok, maupun masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai dalam membantu pembangunan peradaban manusia yang lebih sejahteraan. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tentu pelayanan sosial memiliki standar untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut Suharto (2009:12) tujuan pelayanan sosial sebagai berikut:

1. Untuk membantu anda dalam mengakses dan memanfaatkan layanan
2. Pelayanan pengobatan diketahui mencakup pelayanan yang diberikan untuk melindungi dan merawat pertolongan dan rehabilitasi
3. Pembangunan meliputi pelayanan pembangunan dan sosialisasi

Menurut Schneiderman dikutip oleh Mendoza dalam Isbandi (2015:108-109) terdapat tiga tujuan dari suatu pelayanan sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Kemandirian dan Keadilan Sosial (*Humanitarian and Social Justice Goal*)

Tujuan ini berangkat atas asa cita-cita demokrasi tentang hak mendapatkan keadilan sosial serta keyakinan atas semua orang yang

berhak mengembangkan potensinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dinas sosial mengidentifikasi kelompok yang bergantung pada orang lain serta pada anggota tidak beruntung.

2. Tujuan Pengendalian Sosial (*Social Control Goal*)

Tujuan pengendalian sosial adalah untuk mencegah kelompok rentan, yang dirugikan, atau tidak terpenuhi kebutuhan vitalnya, untuk “menyerang” atau dapat menjadi “ancaman” terhadap orang lain yang memiliki kemampuan diatas mereka. Oleh karena itu adanya kontrol sosial dapat diharapkan membantu mencegah terjadinya yang tidak diinginkan.

3. Pembangunan Ekonomi (*Economic Development Goal*)

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pelayanan sosial yang diharapkan dapat menjadi peningkatan daya atas manusia, barang, serta jasa yang tersedia.

Tujuan merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan sosial. Selain itu, jika kita ambil dari beberapa tujuan pelayanan sosial di atas, bahwa pelayanan sosial pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan dan pengembangan, yang membantu mereka melalui layanan-layanan sosial dan program-prpgram yang memudahkan penerima layaaanan mendapatkan akses penuh terhadap layanan sosial yang sudah disediakan. Selain itu tujuan utama yang bis akita simpulkan tidak lain adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat

secara sosial agar memperoleh kemandirian ketika mendapatkan layanan-layanan yang telah diberikan.

2.2.4 Jenis-Jenis Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagai suatu lembaga pelayanan kemanusiaan dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial Individu, kelompok dan masyarakat tentu memiliki jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan demi memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesejahteraan sosial yang mereka butuhkan. Akses-akses layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, sehingga ketika mendapatkan layanan tersebut masyarakat dapat hidup kembali berdasarkan norma kehidupan yang layak.

Hariwoerjanto, 1986 Dalam Oman Sukmana, Luthfi J. Kurniawan, Masduki Abdussalam (2015:107-109) menyatakan jenis-jenis pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah:

1. Bantuan Sosial Umum (*Public Assistance*)

Orang yang membutuhkan langsung, termasuk asistensi sosial menanggulangi kemiskinan, bantuan untuk lansia, orang-orang cacat dan anak-anak yatim piatu.

2. Asuransi Sosial (*Sosial Insurance*)

Bantuan bagi para buruh serta keluarganya untuk menanggulangi hilangnya mata pencarian mereka karena disebabkan umur yang lanjut, pengangguran, kecelakaan di dalam industry.

3. Pelayanan Kesejahteraan Keluarga (*Family Services*)

Penyuluhan tentang hubungan-hubungan pribadi dan keluarga, tentang soal-soal perkawinan, kesehatan dan masalah keluarga lainnya.

4. Pelayanan Kesejahteraan Anak (*Child Welfare Service*)

Menempatkan anak yatim di rumah orang tua angkat, dipinti asuhan, supervisi asuhan keluarga, dan adopsi anak, perilaku yang a-sosial, pemeliharaan bayi, pelayanan sosial di dalam sekolah, perlindungan anak yang bekerja, dll.

5. Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan (*Health and Medical Service*)

Mendirikan pelayanan kesehatan bagi para ibu dan anak, mendirikan pusat kesehatan bagi anak-anak, kunjungan juru rawat, mengusahakan rehabilitasi bagi anak-anak cacat, dll.

6. Pelayanan Kesejahteraan Kesehatan Jiwa (*Mental Higiene Service*)

Pelayanan dirumah sakit dan sanatorium untuk orang-orang yang sakit jiwa dan yang jiwanya lemah baik orang dewasa maupun anak-anak.

7. Pelayanan Kesejahteraan dalam Bidang Kejahatan (*Corektinol Service*)

Pelayanan bagi pemuda yang mendapatkan pelayanan percobaan dan pengadilan criminal, pelayanan-pelayanan diagnose dan pengobatan, bimbingan sosial perorangan (*case work*) dan bimbingan sosial kelompok (*social group work*) di dalam rumah-rumah tahanan, lembaga pemasayrakatan

8. Pelayanan Kesejahteraan Para Pemuda di dalam Pengisian Waktu Luangnya (*Youth leure-time service*)

Mendirikan pusat kegiatan bagi pemuda, rumah penampungan, menyediakan fasilitas rekreasi, memberikan bantuan kepada kelompok muda seperti klub-klub anak-anak, kepramukaan (kepanduan), organisasi

9. Pelayanan Kesejahteraan bagi Veteran (*Veteran's Service*)

Pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan veteran, diantaranya bimbingan sosial perorangan dan bimbingan sosial.

10. Pelayanan Kesejahteraan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja (*Employment service*)

Mencarikan lapangan bagi para karyawan, memberikan perlindungan bagi kepentingan buruh, memberikan pendidikan keselamatan kerja, memberikan bantuan terhadap usaha rehabilitasi jabatan.

11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Bidang Perumahan (*Hausing Services*)

Membantu perumahan, usaha-usaha untuk membersihkan daerah kumuh dan pembangunan kota kembali dan pelayanana lainnya

12. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (*Community welfare service*)

Usaha-usaha untuk perencanaan, pengorganisasian, dan dana-dana sosial kesehatan melalui media-media seperti misalnya badan kesejahteraan masyarakat dan badan lainnya.

13. Pelayanan-Pelayanan Sosial Internasional

Program bantuan PBB, Bantuan anak-anak PBB, Konferensi internasional mengenai pekerja sosial, Komite palang merah internasional, Federasi Kesehatan Mental sedunia, Lembaga Sosial Internasional, dan

persatuan pemuda dunia, atau di lembaga-lembaga sosial yang beroperasi di negara-negara asing.

Menurut Suharto, (2017) layanan sosial dapat dikategorikan berdasarkan pelayanannya sebagai berikut”

Pelayanan dan perawatan khusus (misalnya layanan konseling, kesehatan jiwa, layanan kebutuhan khusus (tergantung pada anak, remaja, lanjut usia, lingkungan atau lokasi (misalnya sekolah, tempat kerja penjara, rumah sakit dan layanan sosial lainnya) atau jenis bidangnya layanan perawatan (misalnya layanan konseling, kesehatan mental, layanan kebutuhan khusus).

Pelayanan sosial merupakan layanan yang ditunjukkan untuk membantu setiap individu, kelompok, dan masyarakat yang sedang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial, layanan sosial adalah sebagai pusat rehabilitasi kehidupan bagi kelompok-kelompok rentan yang mengalami permasalahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Lebih jauh lagi pelayanan sosial adalah pelayanan yang memberikan aspek sosial dalam memberikan layanan yang mengedepannya pada aspek penyembuhan.

2.3 Tinjauan Rehabilitasi Sosial

2.3.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses yang ditunjukkan untuk individu yang tidak hanya mengalami gangguan fisik dan mental, tetapi juga fungsi sosial yang mempengaruhi kepuasan dan kebutuhan mereka. Proses ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabailitasi Sosial bahwa

“Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Berdasarkan gambaran di atas, bahwa rehabilitasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan fisik dan mental saja. Melainkan lebih dari itu, sehingga rehabilitasi sosial mengambil peran penting dalam semua lapisan masyarakat yang sedang mengalami masalah-masalah yang perlu dilakukan rehabilitasi.

Menurut Suparlan (1993:124) dalam Nur'aini (2022:13) rehabilitasi sosial sebagai sebagai berikut:

“Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan jasmani, serta mental seseorang sehingga dapat membantu permasalahan sosial bagi dirinya”

Maka secara garis besar rehabilitasi sosial adalah segala upaya pemenuhan dan pemulihan kebutuhan individu yang sedang mengalami masalah sosial. Kemudian rehabilitasi sosial adalah serangkaian program holistik, intervensi sosial, dan dukungan melalui berbagai upaya pelayanan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial individu yang sedang mengalami disfungsi sosial di masyarakat.

2.3.2 Tujuan Rehabilitasi Sosial

Pada dasarnya tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan seorang agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu mengembalikan kepercayaan diri, kesadaran serta tanggung jawab menjadi salah satu tujuan dari rehabilitasi sosial.

Menurut Departemen Sosial (2010) dalam Haryanto (2010:78) tujuan dari rehabilitasi sebagai berikut:

1. Pemulihan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial masyarakat.
2. Pemulihan kemampuan menjalankan fungsi sosial dengan baik.

Menurut Haryanto (2020:78) tujuan rehabilitasi sosial yang paling utama adalah sebagai berikut:

“Pemulihan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial serta pemulihan kemampuan menjalankan fungsi sosial dengan baik”

Jika berkaca pada definisi di atas, tujuan rehabilitasi sosial secara umum memiliki makna mengembalikan keberfungsian sosial seseorang yang mengalami disfungsi sosial melalui tahapan-tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang ditunjukkan untuk membantu semua lapisan masyarakat dalam kembali ke dalam tata kehidupan yang sesuai dengan norma kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu rehabilitasi sosial jika bicara pada proses pertolongan sosial, rehabilitasi sosial adalah serangkaian upaya-upaya yang memberikan akses penuh ke dalam proses pelayanan sosial bagi orang-orang yang membutuhkannya.

2.3.4 Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pertolongan berbasis kemanusiaan dengan maksud memberikan kebutuhan-kebutuhan penyandang masalah yang membutuhkan tindakan rehabilitasi sosial. Dalam penanganan gelandangan dan pengemis tahapan rehabilitasi sosial mengedepankan aspek keberfungsian secara mental, sosial, fisik bahkan spritual. Dalam memberikan layanan sosial, rehabilitasi sosial memiliki ketentuan serta standar dalam melaksanakan serangkaian pertolongan kesejahteraan sosial berbasis rehabilitasi sosial. Termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang dimaksud proses rehabilitasi sosial sebagai berikut:

1. Pendekatan awal

Tahap dimana pekerja sosial melakukan kontak awal dengan klien untuk melakukan beberapa kesesuaian melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan lembaga.

2. Asesmen

Asesmen adalah tahap penggalian masalah yang ada didalam diri klien, pada tahap ini pekerja sosial menggali masalah serta kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh klien.

3. Penyusunan rencana intervensi

Rencana intervensi merupakan tahap yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari asesmen. Pada tahapan rencana intervensi pekerja sosial melakukan langkah-langkah menyusun rencana terkait kebutuhan apa yang menjadi prioritas klien.

4. Intervensi

Intervensi merupakan tahap pemberian kebutuhan layanan berdasarkan hasil rencana intervensi sebelumnya yang telah dibuat. Pada tahap intervensi pekerja sosial diharapkan menampilkan peran petolongan sesuai dengan kebutuhan.

5. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan tahap dimana mempersiapkan klien agar nanti ketika kembali ke dalam masyarakat klien dapat berperan aktif. Dalam proses ini hal yang dilakukan melalui pemberian nilai kemanusiaan,

kebudayaan serta norma-norma kepada individu yang memerlukan bantuan.

6. Terminasi

Terminasi adalah kegiatan pengakhiran pemberian layanan antara pekerja sosial dengan klien. Tahap terminasi dapat dilakukan apabila tujuan pertolongan yang ingin dicapai sudah selesai, atau apabila klien meminta untuk memutuskan pengakhiran pertolongan.

7. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut atau *aftercare* adalah kegiatan konseling tambahan bagi klien yang dinilai masih memerlukan pelayanan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan sebelum selesai masa konseling dan bimbingan tahap akhir. Bimbingan lanjut memiliki tujuan untuk mempercepat sistem pemasyarakatan berdasarkan permintaan klien atau keluarga.

3.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut (Suryawati, 2004:122) kemiskinan diartikan sebagai berikut:

kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang dan papan. Ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat dikatakan seseorang mengalami kemiskinan.

Jika dilihat dari pengertian di atas, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebagai permasalahan ekonomi, namun juga sebagai ketidak terpenuhinya hak-hak

dasar dan perlakuan yang tidak setara terhadap individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Jika hak-hak dasar tersebut tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi hak-hak lainnya. Sementara Mubyanto (1995) mendefinisikan kemiskinan sebagai:

Penduduk yang dirugikan diwujudkan dalam rendahnya penerimaan yang mengakibatkan rendahnya kualifikasi, rendahnya produktivitas, rendahnya terhadap nilai tukar produksi dan kesulitan dalam mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam membangun peradaban.

Berdasarkan definisi dari Mubyarto, kemiskinan bukan hanya karena faktor ekonomi, dan kurangnya angka kesempatan bekerja, tetapi lebih dari itu. Kurangnya keterampilan membuat seseorang kehilangan kesempatan berperan serta dalam pembangunan, akibat kurangnya keterampilan membuat rendahnya pendapatan yang dihasilkan.

2.4.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Berdasarkan keadaan kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang multidimensional menurut (Suryawati, 2014) dibagi ke dalam 4 bagian sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah ketika tidak memiliki pendapatan dari seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mencukupi agar dapat memenuhi standar kehidupan seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar berada dalam kondisi cukup baik. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai rata-rata pengeluaran atau konsumsi atas kebutuhan dasar.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan dalam suatu corak kemiskinan yang diakibatkan oleh kegagalan pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk semua lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang tidak merata di daerah yang sulit ditempuh oleh program perubahan. Kebijakan-kebijakan yang hanya menaruh pada sub sektor tertentu hanya akan menyebabkan ketimpangan sosial sehingga akan menimbulkan kemiskinan struktur ekstrem.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah sesuatu yang disebabkan oleh perilaku tindakan-tindakan yang menjadi kebiasaan individu dan masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan, adat istiadat sehingga membuat mereka enggan mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Kemiskinan ini didasari atas budaya yang selalu dipelihara oleh orang-orang yang dianggap miskin sehingga mereka tetap mempertahankan rasa malas.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan suatu bentuk kemiskinan akibat dari buruknya layanan terhadap sumber kebutuhan, yang mana pada umumnya sering terjadi dalam struktur sosio kultural atau sosiopolitik yang tidak memberikan kesempatan dalam wacana. Sehingga menimbulkan diskriminatif kebutuhan. Kemiskinan struktural adalah ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tetapi akibat dari buruknya sistem layanan membuat masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan tersebut.

2.4.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp, et all dalam Kuncoro (2006) mengatakan penyebab kemiskinan dibagi menjadi 3 sebagai berikut:

Dilihat dari sudut pandang ekonomi: Pertama dari sudut pandang mikro, kemiskinan disebabkan oleh pola kepemilikan yang tidak merata sumber daya yang terbatas dan kualitas yang buruk. Kedua, kemiskinan terjadi dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusia rendah maka produktivitasnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sendiri diakibatkan karena kurangnya partisipasi dalam pendidikan, selain itu warisan turun juga menjadi alasan penting yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan ada karena kesulitan dalam mendapatkan layanan transportasi.

Menurut Suharto (2015) dalam arti yang luas penyebab kemiskinan sebagai adalah berikut:

1. Faktor individu yang berhubungan pada aspek patologis antara lain kondisi fisik dan psikis individu yang buruk. Melihat dari beberapa fenome orang yang dikatakan miskin disebabkan oleh perilaku dan pilihannya sendiri dalam menghadapi kehidupan yang tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik.
2. Faktor sosial atau kondisi lingkungan sosial yang mendorong seseorang jatuh miskin. Seperti keadaan kemiskinan dalam suatu keluarga sehingga akan menyebabkan kemiskinan berikutnya.
3. Faktor budaya, kondisi budaya atau ciri-ciri yang menyebabkan kemiskinan. Elemen merujuk khusus pada konsep kemiskinan budaya yang menghubungkan dampak budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Menurut Suharto (2008) "Perilaku negatif seperti malas serta mudah menyerah pada keadaan, tidak memiliki prinsip berdagang, serta

tidak memiliki etos kerja merupakan hal yang sering ditemukan pada orang miskin.

4. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur yang tidak adil, sensitif, tidak dapat diakses, dan memiskinkan individu atau kelompok orang.

2.4.4 Program Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya angka Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya kelompok rentan miskin tentunya perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk menentaskan masalah kemiskinan yang begitu multideimensional. Penanggulangan kemiskinan dinilai memiliki banyak kekurangan karena hanya berorientasi pada aspek-aspek yang lebih kecil, oleh karena itu untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan diperlukan kajian yang lebih mendalam dan akurat untuk menentukan dan merumuskan strategi yang baik dalam mencegah meluasnya pada masalah-masalah yang lain. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika program yang dicetuskan oleh pemerintah dalam membantu menanggulangi kemiskinan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga sangat miskin.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program ini memfokuskan pada pembiayaan beberapa kegiatan yang tergolong dalam biaya personal dan investasi pada nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan juga menengah pertama.

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Tidak efektifnya dana BOS dalam meningkatkan angka keikutsertaan peserta didik, hal ini dilihat dari masih saja ada siswa yang putus sekolah oleh karena itu perlu adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mana program ini bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas merupakan program bantuan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mana program ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin.

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Program ini merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan jaminan perlindungan pada keluarga miskin.

6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program nasional yang berwujud pada kerangka kebijakan dasar serta acuan pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

7. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Program ini bermaksud untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan Tingkat pengangguran terbuka.

8. PNPM- Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

P2DTK adalah program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk membantu meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan kesewadayaan masyarakat.

9. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Program ini membantu memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relative banyak.

10. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Program ini bermaksud untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan Tingkat pengangguran terbuka.

Dengan kata lain program ini memiliki tujuan dalam membantu mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah pedesaan.

11. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat merupakan dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok yang ingin membuka usaha. Selain itu program ini membantu dalam meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha bersekala besar.

12. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Program Usaha Bersama (KUBE) adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya program ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat terjadi dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Pada dasarnya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah memfokuskan pada bagaimana cara melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan untuk sementara waktu dan melindungi keluarga serta kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan kronis yang mana strategi dalam pengentasan kemiskinan ini berfokus pada tiga program:

- a. Pengembangan dan perlindungan sistem jaminan sosial
- b. Penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok
- c. Pengembangan budaya usaha.

2.5 Tinjauan Tentang Gelandangan dan Pengemis

2.5.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Menurut Setiawan (2020) “Tunawisa dan mengemis merupakan ekspresi kelompok masyarakat yang dirugikan sehingga sangat rentan secara kondisi perekonomian.

Gelandangan dan pengemis adalah orang-orang yang hidup jauh dari kata layak, mengalami gangguan sosial dan tidak dapat hidup seperti orang pada umumnya. Gelandangan adalah orang-orang yang terpinggirkan dari kelompok-kelompok tertentu yang ada pada strata masyarakat. Menurut Zaindal Fadri (2019:5):

Tunawisma secara linguistik didefinisikan sebagai orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan kehidupan layak. Istilah (tunawisma), artinya orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terus menerus merantau. Tuna wisma merupakan mayoritas masyarakat yang berpindah ke kota untuk mengadu nasib di kota, namun tidak memiliki keterampilan sehingga harus memutuskan menjadi tunawisma

Sementara Menurut Poerwadarwita (1990:262) mendefinisikan pengemis sebagai “Orang yang mengemis di tempat yang memiliki banyak kerumunan orang dengan melakukan belas kasih serta membangkit rasa iba pada kebanyakan orang di tempat umum”.

Jika berkeca berdasarkan definisi di atas, bahwa gelandangan dan pengemis adalah orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti manusia pada umumnya sehingga untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya mereka tinggal ditempat-tempat umum dan mencari nafkah melalui berbagai cara mulai dari pengemis, meminta-minta atau hanya menerima belas kasih orang lain

Definisi yang lebih luas menambahkan aspek sosial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, menyatakan bahwa:

“Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Maka bisa dikatakan bahwa gelandangan dan pengemis adalah sekelompok masyarakat yang hidup tidak sesuai norma kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat. Jika dilihat lebih jauh gelandangan dan pengemis adalah orang-orang mengalami disfungsi sosial sehingga membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.

2.5.2. Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Menurut Zainal Fadri (2019) kriteria gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tempat tinggal

Tidak mempunyai apartemen. Kebanyakan tunawisma atau pengemis tidak mempunyai rumah sehingga biasanya berkeliaran di ruang terbuka.

2. Hidup dengan penuh ketidakpastian.

Kehidupan tunawisa dan pengemis memperhatikan karena mereka tidak memiliki rasa aman dalam menjalani hidup.

3. Hidup dibawa garis kemiskinan

Tunawisa dan pengemis tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya di masa depan, bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mempunyai penghasilan tetap.

4. Gelandangan dan pengemis memakai pakaian yang compang-camping dan biasanya tidak mengenakan pakaian yang layak atau berdasi
5. Tidak etis dalam arti tukar istri/suami, hidup bersama istri, homoseksualitas, dan sebagainya
6. Mengemis di tempat umum misalnya halte bus, stasiun kereta api, rumah, toko, dll
7. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak. Sehingga cara mereka agar tetap bisa bertahan hidup hanya mengandalkan belas kasih.
8. Mengemis dengan cara berpura-pura serta kadang memaksa, kemudian disertai dengan bahasa yang manis dan mengandung iba

2.5.3 Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Menurut Maghfur (2010) Secara garis besar penyebab gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

“Rasa malas, kurangnya keinginan dalam bekerja, kelemahan mental, dan cacat fisik, selain itu dikarekan juga faktor keadaan sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan, lingkungan, bahkan geografis”.

Menurut Sudilarasih (2012) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menggelandangan dan mengemis yaitu:

- a. Masalah kemiskinan

Meningkatnya angka kemiskinan berdampak besar terhadap meningkatnya tunawisma dan pengemis. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama

tunawisma atau pengemis meningkat. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan obsesif dalam memenuhi kebutuhan hidup.

b. Masalah pendidikan

Salah satu penyebab seseorang menjadi tunawisma atau menjadi pengemis adalah pendidikan. Sebab, ketika masyarakat berpendidikan rendah, maka cenderung melakukan sesuatu berdasarkan keinginan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. menjadi salah satu penyebab terjadinya seseorang menggelandangan dan menjadi pengemis, hal ini karena rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang melakukan hal yang didasari pada keinginan pribadi tanpa memperdulikan dampak yang terjadi pada masyarakat.

c. Masalah keterampilan kerja

Kemajuan urbanisasi tidak seimbangan dengan keterampilan menyebabkan terjadinya tunawisa dan mengemis terasing oleh ketatnya persaingan yang tidak sesuai dengan pengalaman atau keterampilan kerja yang membuat mereka memutuskan tunawisma atau mengemis.

d. Masalah sosial budaya

Yang menjadi perhatian khusus adalah masalah sosial budaya seperti kebiasaan malas. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dan mempengaruhi perubahan nilai-nilai sosial, khususnya di bidang etika kerja. Artinya, kemalasan yang mendarah daging dalam diri menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk mencapai kualitas hidup sesuai standarnya.

e. Masalah harga diri

Masalah harga diri menjadi berkontribusi pada tunawisma dan mengemis. Jika melihat para tunawisma dan pengemis, sebagian besar dari mereka merendahkan diri demi memperoleh manfaat dan kebutuhannya.

f. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap ini mengakibatkan keengganan untuk memperbaiki kelayakan pra tunawisma dan pengemis dalam mengambil mereka pada fungsi sosial masyarakat.

2.5.4 Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut. Meningkatnya gelandangan dan pengemis menyatakan bahwa penanggulangan yang dilaksanakan kurang maksimal. Pemerintah maupun pihak swasta yang berbasis sosial berkewajiban dalam menekan permasalahan bagi penanggulangan gelandangan dan pengemis. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:

1. Pendekatan Panti

Pendekatan panti asuhan merupakan salah satu cara untuk memerangi tunawisma dan mengemis. Pendekatan ini berfokus pada pengobatan berbasis perumah serta sarana dan prasarana yang memberikan motivasi dan keterampilan kepada para tunawisma dan pengemis untuk mencegah mereka menjadi tunawisma dan pengemis lagi ketika mereka kembali ke masyarakat.

2. Liponsos

Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) adalah proses penanganan tuna wisma dan mengemis dengan fokus pada sistem hidupan berdampingan dalam lingkungan sosial. Perawatan ini hampir sama dengan di panti jompo, namun perawatan yang tersedia di Liposos lebih beragam

3. *Transit home*

Rumah sakit adalah model dukungan sementara (rumah singga)” bagi para tunawisma dan pengemis. rumah transit menyediakan ruang hidup untuk transisi dari jalanan ke tempat tinggal permanen. Selain inisiatid di aats, anda juga bisa menagnai tuna wisma dan mengemis.

2.6 Tinjaun Peran Pekerja Sosial

2.6.1 Peran Pekerja Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peran merupakan asuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika ingin menempatkan dirinya pada suatu lingkungan yang harus dijalankan.

Menurut Soekanto (2002:243-244) yang dimaksud dengan peran sebagai berikut:

Peran adalah aspek dinamis dari posisi status. Apabila seseorang menggunakan hak serta kewajibannya berdasarkan tingkatannya, maka ia telah memenuhi perannya. Sedang status adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dipunya bagi semua orang ketika menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Peran dibentuk atas dasar posisi yang diperoleh.

Berkaca dari pengertian Soekanto, bahwa peran secara garis besar merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan baik itu individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Melihat lebih jauh. Peran juga merupakan tindakan atau perilaku yang mutlak dilakukan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam

pemegang status sosial di masyarakat. Maka apabila seseorang atau lembaga dapat melaksanakan peranannya dengan baik bisa dikatakan mereka dapat menempati suatu posisi di dalam status sosial

Dalam proses pemberian pertolongan dan pelayanan sosial, seorang pekerja sosial yang dibekali ilmu pengetahuan sehingga mereka dituntut menampilkan peranannya secara profesional. Menurut Parson, Jorgensen, dan Hernandez dalam Pujileksono (2019:165) yang dimaksud dengan peran pekerja sosial meliputi: “fasilitator, broker, mediator, pembela, perlindungan, dan pendidik”.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial bagi penanganan gelandangan dan pengemis. adapun peran tersebut sebagai berikut:

1. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial berfungsi untuk mengubungkam klien dengan sistem sumber daya yang diperkuat, karena mereka umumnya tidak menyadari berapa banyak sumber daya layanan masyarakat yang tersedia.

2. Fasilitator

Peran pekerja sosial sebagai fasilitator adalah fokus pada pemberian pendidikan, fasilitas, dan promosi interkasi dan tindakan. Dalam menangani gelandangan dan pengemis pekerja sosial diharapkan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

3. Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Peran pekerja sosial dalam memberikan motivasi adalah dengan meningkatkan kesadaran klien dalam menghadapi masalah sosial dan

mendorong mereka untuk segera mewujudkan niatnya dalam tindakan untuk mencari alternatif sosial. Pekerja sosial berperan sebagai motivasi ketika menghadapi klien yang putus asa, tidak memiliki kekuatan atau energi untuk bertindak, putus asa, frustrasi, malas, dan acuh tak acuh terhadap masalah.

4. Pemberi Nasehat (*Counselor*)

Konseling merupakan salah satu tugas terpenting pekerja sosial ketika menangani tunawisma dan pengemis. dalam hal ini pekerja sosial memberikan konseling kepada para tunawisma dan pengemis serta membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

5. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial sebagai pendidik (*teacher/educator*) membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mereka layani perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak mampu menjadi mampu. Kami akan mendukung anda untuk lakukan itu mengalami pelepasan pembelajaran

6. Penyembuh Sosial

Pekerja sosial, bersama dengan orang-orang yang tertarik pada bidang sosial dan kemanusiaan, membantu klien bekerja secara efektif dalam semua kegiatan masyarakat dan mengubah kebijakan kelembagaan untuk menemukan solusi terhadap masalah keadilan sosial.

2.6.2 Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan:

Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga maupun pemerintah swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut pekerja sosial sebagai suatu profesi yang bergerak pada bidang pertolongan manusia memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan yang sebelumnya di peroleh. Selain itu, dalam melaksanakan proses rehabilitasi sosial pekerja sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan. Termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial menyatakan bahwa peran pekerja sosial adalah melaksanakan rehabilitasi sosial serta:

1. Bimbingan keterampilan

Bimbingan keterampilan memiliki tujuan untuk memberikan gelandangan dan pengemis keterampilan sehingga ketika mereka nanti kembali ke dalam masyarakat, tidak kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis. pada bimbingan keterampilan pekerja sosial bisa berperan sebagai asesor sehingga bisa menentukan kebutuhan klien.

2. Bimbingan Mental

Bimbingan mental adalah bimbingan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis dengan maksud meningkatkan kesadaran mental yang sebelumnya terganggu akibat apa yang disebabkan oleh lingkungan sekitar gelandangan dan pengemis. dalam bimbingan mental pekerja sosial memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dalam membangun psikologis serta interaksi antara sikap, kebutuhan maupun persepsi klien.

3. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik adalah bimbingan yang bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkhusus bagi gelandangan dan pengemis. Dalam bimbingan fisik hal-hal yang dilakukan seperti olah raga dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan gelandangan dan pengemis. Dalam bimbingan fisik pekerja sosial memiliki peran dalam menentukan tujuan, kebutuhan serta target yang ingin dicapai. Selain itu dalam proses bimbingan fisik, pekerja sosial berperan penting melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan klien ke dalam sistem sumber yang dibutuhkan.

4. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial adalah bimbingan yang memfokuskan pada pemulihan dan pengembangan pada diri gelandangan dan pengemis. Bimbingan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan konseling yang memiliki tujuan untuk mengembalikan peranan gelandangan dan pengemis di masyarakat. Pada bimbingan sosial pekerja

sosial memiliki peranan melaksanakan asesmen sehingga bisa mengetahui kebutuhan serta keadaan klien, selain itu pekerja sosial juga berperan sebagai perencana dalam merencanakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama proses bimbingan.